

## **"TENTARA RAKYAT" DI BANTEN SELATAN: KEKUATAN TERAKHIR PEMBELA TAN MALAKA**

---

Suharto<sup>1</sup>

### *Abstract*

*After the first Dutch aggression, five Bambu Runcing (BR) Divisions were established in West Java. One of them was posted at Sanggabuana Mountain, Purwakarta, lead by Wahidin Nasution and, then, Khaerul Saleh. In the area, including this division, there were two military troops cooperated and united under Staff of Guerrilla Group of East Jakarta Territory, commanded by Mayor Sambas Atmadinata. However, the cooperation did not last for a long time, since armed contacts between Siliwangi and the BR often occurred. BR was pushed back and decided to continue activities in South Banten, where later, the group's name becomes "Tentara Rakyat" (People Army). Here, they openly opposed the Government of the Republic of Indonesia because of several agreements arranged with the Dutch and targeted government officials, including police and the military, and killed them violently. These activities had feared people, therefore in the end of October 1949, the Indonesian National Army ended the actions whose based the movement was to continue Tan Malaka's ideas.*

*Keywords: South Banten, people army, revolution, political history*

### **Pendahuluan**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang untuk menguasai kembali Indonesia. Untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia–Belanda, Pemerintah Republik Indonesia (RI) lebih mengutamakan jalur diplomasi daripada perlawanan bersenjata. Agar supaya bisa berunding dengan pihak Belanda, pemerintah mengubah bentuk kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer dan Sutan Syahrir yang tidak berkolaborasi dengan

---

<sup>1</sup>Penulis adalah dosen pada Departemen Sejarah - Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok. Dapat dihubungi melalui e-mail: suharto.hum@ui.edu.id

Jepang ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai perdana menteri. Sejak itu perundingan dengan pihak Belanda dimulai.

Kebijakan berdiplomasi tersebut mendapat tantangan hebat dari Persatuan Perjuangan (PP), suatu organisasi yang dibentuk pada bulan Januari 1946 dan dipimpin oleh Tan Malaka. Sebanyak 141 organisasi bergabung dalam organisasi tersebut. Program minimum PP berisi tujuh program inti yaitu: (1) Berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan 100%, (2) Pemerintahan rakyat (dalam arti sesuai haluan pemerintah dengan kemauan rakyat), (3) Tentara rakyat (dalam arti sesuai haluan tentara dengan kemauan rakyat), (4) Melucuti tentara Jepang, (5) Mengurus tawanan bangsa Eropa, (6) Menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh (kebun), (7) Menyita dan mengurus perindustrian (pabrik, bengkel, tambang, dll.) (Anderson, 1988: 320-321).

Oleh karena kuatnya oposisi PP dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Solo bulan Februari 1946, Sutan Syahrir meletakkan jabatan. Namun Presiden Sukarno menunjuk kembali ia untuk memimpin kabinet dan tanggal 3 Maret 1946 terbentuklah Kabinet Sutan Syahrir kedua. Ia meneruskan perundingan dengan Belanda meskipun kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh Belanda. Untuk memungkinkan dilaksanakan perundingan, Perdana Menteri Syahrir pada bulan Maret 1946 menangkap dan memenjarakan Tan Malaka beserta enam pemimpin PP lainnya yaitu Abikusno Cokrosuyoso, Khaerul Saleh, Sukarni, Suprpto, Muhammad Yamin, dan Wondoamiseno (Kahin, 1995: 224). Pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa orang menteri diculik oleh golongan Tan Malaka di Solo karena Indonesia akan menerima pengakuan kemerdekaan hanya atas Jawa dan Sumatra, sedang pulau-pulau lainnya diserahkan kepada Belanda. Akan tetapi sesudah beberapa hari, ia dibebaskan. Setelah itu terjadi Peristiwa 3 Juli 1946 yang menghendaki agar kabinet Syahrir kedua dibubarkan dan diganti dengan kabinet baru. Presiden menolak pembubaran kabinet dan mereka yang mengajukan petisi tersebut ditangkap. Pertengahan bulan Juli 1946 PP dibubarkan, kemudian Sutan Syahrir mengundurkan diri. Namun untuk ketiga kalinya ia ditunjuk Presiden Sukarno sebagai Perdana Menteri. Tanggal 2 Oktober 1946 kabinet Syahrir ketiga terbentuk. Dalam kabinet tersebut dihasilkan naskah Persetujuan Linggajati yang diparaf tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Akan tetapi kabinet Syahrir ketiga ini pada 26 Juni 1947 jatuh karena sayap kiri tidak mempercayainya lagi kemudian digantikan oleh Amir

Syarifuddin. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer pertama.

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengungkapkan pandangan dan tindakan para pengikut Tan Malaka di Banten Selatan dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia - Belanda khususnya pasca agresi militer Belanda pertama.

### **Laskar Bambu Runcing**

Setelah agresi militer Belanda pertama, pada akhir bulan Juli 1947 Sutan Akbar<sup>2</sup> mendapat mandat dari Jenderal Sudirman untuk menyusun kembali kekuatan di Jawa Barat. Atas dasar mandat itu di Jawa Barat dibentuk Divisi Bambu Runcing (BR) dipimpin oleh dirinya. Walaupun memakai nama "divisi", tetapi kesatuan tersebut bukan bagian dari kesatuan tentara reguler. Keberadaan Laskar BR merupakan perwujudan sikap perjuangan tanpa kompromi yang menuntut tidak perlu diberikannya konsesi apapun kepada Belanda. Ia menginstruksikan kepada teman-teman lamanya di Jawa Barat untuk terus melawan Belanda.

Di atas kertas, ia memecah divisi dalam lima brigade yang mencakup brigade di: Cirebon, Priangan, Bogor, Jakarta, dan Banten. Brigade terkuat ada di Ciwaru, sebelah tenggara Cirebon yang dipimpin langsung oleh Sutan Akbar. Brigade di Priangan dipimpin oleh Akhmad Astrawinata, di Bogor dipimpin oleh Waluyo<sup>3</sup> dibantu Muhidin Nasution, di Jakarta dipimpin oleh Wahidin Nasution, dan di Banten dijalin hubungan dengan residen Banten Kiai Haji Akhmad Khatib (Cribb, 1990: 153).

Brigade BR di Jakarta pimpinan Wahidin Nasution kemudian bergeser kedudukannya ke daerah Purwakarta bergabung dengan sisa-sisa Laskar Rakyat Karawang, bermarkas di Pangkalan di lereng gunung Sanggabuana, Purwakarta. Belum lama mereka berada di sana, Syamsuddin Chan, salah seorang pemimpin Barisan Rakyat (BR) dari

---

<sup>2</sup>Sutan Akbar nama aslinya Bahar Rezak, seorang mahasiswa kedokteran, pemimpin Laskar Rakyat Djakarta Raya (LRDR) yang dibentuk di Salemba tanggal 22 November 1945 (Cribb, 1990: 61).

<sup>3</sup>Waluyo datang ke daerah Bogor setelah PP dibubarkan bulan Juli 1946. Ia adalah tokoh Sukabumi. Ia pernah sebagai Ketua Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Sukabumi.

Jakarta, dan Umar yang membelot dari *Hare Majesteit's Ongeregelde Troepen* (Hamot, Laskar Sri Ratu), bergabung. Brigade tersebut merupakan brigade terkuat nomor dua setelah brigade di Ciwaru. Pimpinan brigade merasa mempunyai tanggung jawab yang berat atas perjuangan bersenjata di Jakarta, karena itu ia menyatukan kesatuan-kesatuan laskar di daerah itu dalam satu federasi bernama Divisi 17 Agustus. Federasi tersebut terdiri atas Kesatuan BR, Hizbullah pimpinan Tabrani Idris, dan *Field Preparation* pimpinan Usman Sumantri yang sesudah Persetujuan Renville ditandatangani mengubah nama menjadi Satuan Pemberontak 88 (SP88).<sup>4</sup> Federasi tersebut juga mencakup kelompok gembong setempat seperti kelompok gembong pimpinan Pak Macem. Dalam Kesatuan SP88 ada sejumlah kesatuan khusus seperti Sember Nyawa, Siluman, dan Garuda Putih. Semua kegiatan Divisi 17 Agustus berjalan tanpa bantuan dari pemerintah RI, bahkan menolak instruksi pemerintah untuk meninggalkan daerah tersebut (Cribb, 1990: 180).

Setelah Persetujuan Renville dan kesatuan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta, laskar-laskar di Jawa Barat tidak ikut serta. Kaum gerilyawan Divisi 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus 1948 mengumumkan terbentuknya Pemerintah Republik Jawa Barat (PRJB). Divisi 17 Agustus menjadi badan ketentaraan PRJB dengan nama Divisi Gerilya 17 Agustus, dipimpin Oya Sumantri (orang Sunda, pimpinan Masyumi setempat) sebagai ketua dan Wahidin Nasution sebagai Wakil Ketua I. PRJB merupakan pemerintah, bukan negara, menyatakan setia pada prinsip-prinsip semula dari proklamasi 1945 dan kepada Sukarno – Hatta. Namun PRJB menolak semua subordinasi kepada pemerintah RI, khususnya Persetujuan Renville. Mereka meneruskan oposisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah RI, tetapi tidak menentang legitimasi RI (Cribb, 1990: 181).

Setelah Yogyakarta diduduki Belanda melalui agresi militernya kedua, Divisi Siliwangi kembali ke daerah asal mereka di Jawa Barat untuk melanjutkan perang gerilya. Mereka melakukan *long march*

---

<sup>4</sup>Menurut hasil wawancara Robert Bridson Cribb dengan A.S. Wagijanto, Karawang, tahun 1982, angka "88" menyatakan bahwa angka "8" yang pertama berarti "S" huruf kedelapan abjad Jawa, angka "8" kedua mengacu pada huruf "H" huruf kedelapan abjad Latin. Jadi "88" merupakan acuan tersembunyi kepada Sukarno dan Hatta. Kata Cribb, menurut suatu laporan, "88" berarti "HH" atau "hati-hati" (Cribb, 1990: 190).

dalam lima gelombang, menapaki punggung pegunungan di Jawa Tengah dan baru berpisah di dekat perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mereka berpencar menuju ke daerah brigade yang lama. Di sepanjang perjalanan mereka dihadang oleh pasukan Belanda dan gerombolan Darul Islam (DI). Dalam waktu antara satu setengah sampai dua bulan, sebagian besar Kesatuan Siliwangi telah berada di daerah mereka yang lama. Batalion-batalion Darsono, Lukas Kutaryo, dan Sentot Iskandarinata, masing-masing berpangkalan di Karawang, Cikampek, dan Purwakarta di bawah komando Mayor Sambas Atmadinata. Pasukan Siliwangi segera melakukan strategi gerilya, membentuk *wehkreise*, komando-komando *distrik* dan *onder distrik* militer dan menempatkan kembali administrasi sipil di bawah otoritas militer (Cribb, 1990: 194).

Melalui rute yang dilalui oleh sebagian besar pasukan Siliwangi, bergerak sebuah rombongan kecil nonmiliter di bawah pimpinan Khaerul Saleh. Rombongan beranggota 20 orang pengikut Tan Malaka dan anggota LRJR yang lama. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjuangan di Jawa Barat jika Belanda menyerang. Sebelumnya, mereka berusaha agar Tan Malaka turut bersama mereka, akan tetapi ia memilih Jawa Timur yang menurutnya lebih aman. Rombongan tiba di tempat rekan-rekan lama mereka di gunung Sanggabuana, Purwakarta, pada awal bulan Februari 1949. Tidak lama kemudian diadakan pertemuan antara tokoh BR dengan mereka yang baru tiba, keputusannya antara lain kepemimpinan BR diserahkan kepada Khaerul Saleh.

Sebelum kedatangan rombongan Khaerul Saleh, tanggal 26 dan 27 Januari 1949 diselenggarakan konferensi PRJB. Dalam konferensi itu muncul dua pendapat. Pendapat pertama terang-terangan mendukung kebijakan pemerintah. Pendapat kedua menolak pendapat pertama dan mendesak agar PRJB tetap melanjutkan perjuangan tanpa bertumpu pada pemerintah. Konferensi akhirnya memutuskan mengubah nama PRJB menjadi Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (PNKRI) sebagai wujud kesetiaan mereka terhadap pemerintah RI.

Sehubungan dengan hasil konferensi tersebut, Khaerul Saleh dapat mengajak Wahidin Nasution dalam kedudukannya sebagai Komandan Divisi 17 Agustus dan Oya Sumantri sebagai Ketua PRJB untuk mengadakan rapat. Dalam rapat yang diadakan tanggal 6 dan 7 Maret 1949 Khaerul Saleh dan kelompoknya tidak menyetujui

keputusan konferensi. Rapat memutuskan mengembalikan nama PNKRI ke PRJB, mempertahankan kesatuan bersenjata yaitu Divisi 17 Agustus, dan perjuangan tidak menggantungkan diri pada pemerintah. Mulai saat itu Hasan Gayo dan Johar Nur dari kelompok Khaerul Saleh memperkuat PRJB.

Sepanjang bulan Maret 1949, konflik antara Kesatuan Siliwangi dan laskar dapat dihindari. Sehubungan dengan hal itu tanggal 6 April 1949 dibentuk Staf Gabungan Gerilya Jakarta Timur yang merupakan gabungan antara BR, SP88, dan Kesatuan Siliwangi di bawah pimpinan Mayor Sambas Atmadinata. Mereka bersama-sama melakukan perang gerilya melawan Belanda.

Akan tetapi, kerja sama tersebut akhirnya bubar setelah tercapai Persetujuan Rum - van Royen yang isinya bahwa untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara ditempuh jalan perundingan. Untuk menunjang persetujuan, diadakan gencatan senjata dan gencatan senjata tersebut ternyata menjadi sumber perpecahan antara laskar dan tentara. Dalam pertemuan pada minggu kedua bulan Agustus 1949 pendapat di kalangan Divisi 17 Agustus terbagi dua. Wahidin Nasution dan Oya Sumantri berpendapat bahwa Persetujuan Rum - van Royen merupakan kemenangan akhir pemerintah RI. Untuk itu mereka menyerukan agar anggota gabungan mengikuti kebijakan tersebut. Pendapat tersebut ditentang oleh Khaerul Saleh dan kelompoknya dari BR. Bagi mereka, persetujuan itu merupakan bentuk pengkhianatan republik terhadap prinsip-prinsip revolusi nasional.

Pada tanggal 6 Agustus 1949 atas gagasan Khaerul Saleh diadakan pertemuan antara BR, SP88, dan Kesatuan Siliwangi di kampung Tonjong di lereng Gunung Sanggabuana. Mayor Sambas Atmadinata sebagai pimpinan kesatuan Siliwangi menyatakan bahwa TNI harus bersikap loyal, tunduk pada putusan gencatan senjata. Sikap yang sama dinyatakan juga oleh SP88. Namun Hasan Gayo yang mewakili BR menyatakan sebaliknya dan atas nama kelompoknya ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan. Pertentangan tersebut mengakibatkan bubarnya staf gabungan. Khaerul Saleh kemudian memindahkan markasnya ke Pangkalan, di lereng utara Gunung Sanggabuana, Purwakarta.

Setelah rencana ditariknya tentara Belanda makin jelas, dalam pertemuan PRJB tanggal 1 September 1949, ketuanya, Oya Sumantri, memutuskan untuk membubarkan pemerintah tersebut. Hal serupa

dilakukan juga oleh Wahidin Nasution terhadap Divisi Gerilya 17 Agustus yang dipimpinnya dan membebaskan anggotanya untuk memilih jalan masing-masing. Khaerul Saleh dan kelompoknya kembali menentang keputusan itu. Sejak itu antara BR dan kesatuan Siliwangi sering terjadi bentrokan bersenjata, banyak anggota BR yang terbunuh. Kesatuan Siliwangi mendesak kedudukan BR, mereka terusir dari markasnya, menyingkir ke daerah Cibinong, Bogor Utara. (*Merdeka*, 11 Oktober 1949).

BR tetap bertekad untuk melanjutkan aksinya. Pada tanggal 28 September 1949 mereka mengadakan pertemuan rahasia di Jonggol, Bogor Utara. Sebagian besar yang hadir menginginkan agar BR mengkonsolidasikan kekuatannya di Banten Selatan. Dipilih daerah tersebut karena menurut mereka BR akan mendapat dukungan dari rakyat setempat. Hanya sedikit anggota yang menentang rencana itu, antara lain Wahidin Nasution.

### **Aksi "Tentara Rakyat"**

Situasi di Banten Selatan setelah gencatan senjata, berbeda dengan situasi sebelumnya. Setelah gencatan senjata dilaksanakan mulai malam tanggal 10/11 Agustus 1949, Pemerintah Daerah Banten mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki berbagai sarana yang rusak akibat perang. Mereka memperbaiki jalan-jalan, jembatan-jembatan, kantor-kantor pemerintah daerah, mesjid-mesjid, sekolah-sekolah, dan saluran-saluran irigasi. Polisi dan pamong praja bertugas menjaga keamanan menggantikan TNI yang telah diasramakan (*Antara*, 4 Oktober 1949).

Minggu pertama bulan Oktober 1949, Laskar BR sekitar 400 orang dipimpin langsung oleh Khaerul Saleh bergerak dari Bogor Utara menuju Banten Selatan. Dalam rombongan tersebut terdapat Syamsuddin Chan, Wim Mangelep, Sidik Samsi, dan Camat Nata. Pimpinan BR Bogor, Muhidin Nasution, juga menuju Banten Selatan bergabung dengan mereka karena di daerahnya ia dicurigai TNI dan masyarakat. Mereka bergerak lewat Lebak Selatan, menghindari pasukan Belanda dan TNI, menuju Cibaliung Banten Selatan, daerah yang tidak terlalu ketat dijaga oleh TNI. Dalam perjalanan terjadi kontak senjata dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo dan kesatuan-kesatuan khusus bentukan Belanda yang menjaga perkebunan. Dalam perjalanan ke Banten

Selatan mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan. Mereka dengan mudah menguasai Malingping di Lebak Selatan kemudian terus ke barat menuju Cibaliung.<sup>5</sup> Mereka juga dengan mudah menguasai kota kecil tersebut karena TNI tengah berkumpul kembali di bagian utara Keresidenan Banten (Kahin, 1990: 82).

Laskar BR melakukan aksinya di daerah Cibaliung. Aksi mereka kejam, sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, melakukan pembunuhan terhadap pihak-pihak yang menjadi lawannya. Ketika berada di Purwakarta, musuh mereka adalah tentara Belanda, tetapi setelah berada di Banten, musuh mereka selain Belanda adalah pemerintah RI, termasuk aparat keamanannya. Masyarakat gelisah karena perbuatan mereka, banyak korban berjatuh, baik dari kalangan sipil, polisi, militer, maupun rakyat. Korban tersebut antara lain Wakil Residen Banten Ahmad Fathoni,<sup>6</sup> Kepala Kepolisian Keresidenan Banten Komisaris Polisi Yusuf Martadilaga,<sup>7</sup> Letnan Dua Mukhtar,<sup>8</sup> dan Lurah Halimi dari Cibaliung. Kecuali yang disebutkan terakhir, mereka bertiga setelah ditawan satu malam, dibunuh pada hari Minggu malam

---

<sup>5</sup>Ketika Laskar BR bergerak dari Malingping menuju Cibaliung, di daerah Cikeusik mereka bertemu dengan Residen Banten K.H. Akhmad Khatib. Ia tidak dibunuh oleh BR dan apa yang dibicarakan oleh pimpinan BR dengannya, tidak diketahui.

<sup>6</sup>Ahmad Fathoni menjadi Wakil Residen Banten sejak pemerintah daerah Banten ada di pedalaman, menggantikan Wakil Residen Banten Subari yang memihak pada Belanda. Setelah menjadi wakil residen, kedudukannya sebagai Ketua Dewan Partai Masyumi Daerah Banten untuk sementara dijabat oleh Wakil Ketua Dewan Partai, Sadli Hasan (*Merdeka*, 4 November 1949).

<sup>7</sup>M. Yusuf Martadilaga dilahirkan di Waringinkurung, Serang, tahun 1908. Sejak bulan Mei 1946 ia bertugas sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Banten, menggantikan Komisaris Oskar Kusumaningrat. Ketika Banten diduduki oleh Belanda, ia bersama pasukan yang dibawa mengungsi ke daerah pedalaman, bergerilya di daerah Cibaliung – Cikeusik. Ketika menjalankan tugas ia disergap pasukan Bambu Runcing yang berjumlah sekitar 150 orang (Rakhman, 1980: 1-2).

<sup>8</sup>Kapten Mukhtar (ada yang menyebut Letnan Dua) adalah perwira utusan dari pemerintah Pusat RI di Yogyakarta. Ia datang membawa misi untuk membantu lancarnya penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah RI. Anggota militer lainnya yang menjadi korban sebanyak 10 orang prajurit dari Malingping pimpinan Sersan Hasan dari Sektor XIII, tujuh orang bintangara dan prajurit dari Cibaliung pimpinan Letnan Muda Suparno (Sunji, 1983:42).

Senin tanggal 9 Oktober 1949 di daerah Cikeusik. Jenazah mereka dikubur dalam satu lubang di pinggir sungai kecil dekat Desa Dahu, Kecamatan dan Kawedanaan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang (Rachman, 1980:2). Beberapa hari kemudian, ketiga mayat tersebut dapat ditemukan. Jenazah Yusuf Martadilaga kemudian dimakamkan di makam keluarga di Kampung Ciherang, kota Pandeglang.<sup>9</sup> Wakil Residen Ahmad Fathoni dimakamkan di Serang, dan Letnan Dua Mukhtar dibawa ke Yogyakarta (Rachman, 1980: 2). Pada waktu yang bersamaan, pasukan BR lainnya membunuh Letnan Suwarno beserta 27 orang anggotanya di Kampung Sawah, Cibaliung. (Ilyas, *et.al.*, 1980: 15).

Di Banten Selatan, Laskar BR menamakan dirinya "Rakyat Berjoang", atau "Rakyat Indonesia Berjoang". Setelah membunuh ketiga pejabat tersebut di atas, bertempat di suatu tempat di Jawa Barat,<sup>10</sup> pada tanggal 11 Oktober 1945 mereka memproklamasikan berdirinya "Tentara Rakyat".<sup>11</sup> Mereka yang mengatasnamakan "Rakyat Berjoang" sebanyak 24 orang di antaranya sebagai pimpinan Khaerul Saleh, dan Muhidin Nasution, dan yang aneh adalah K.H. Tbg. Akhmad Khatib. Disebutkan latar belakang didirikannya "Tentara Rakyat" karena mereka menilai negatif terhadap pimpinan nasional RI. Dikatakan bahwa Sukarno – Hatta tidak memberikan tuntunan, tidak tegas, dan tidak teguh, sehingga menurutnya rakyat Indonesia terancam bahaya dan menuju kehancuran. Mereka menilai bahwa Persetujuan Linggajati, Renville, dan Rum - van Royen membawa perjuangan rakyat Indonesia ke Konferensi Meja Bundar, yang menurut mereka masuk dalam lingkaran penjajalan nasib dan kemerdekaan rakyat Indonesia. Mereka tidak dapat membiarkan riwayat kemerdekaan rakyat menuju kehancuran. Mereka tidak setuju dengan gencatan senjata dan menamakan mereka yang setuju sebagai "Belanda *irêng*" (hitam). Mereka tidak mau membiarkan nasib, kepentingan, dan kebutuhan

---

<sup>9</sup>Di tempat gugurnya Yusuf Martadilaga pada tahun 1971 didirikan sebuah tugu peringatan (Rakhman, 1980: 2).

<sup>10</sup>Mereka merahasiakan tempatnya, tetapi diduga di daerah Cibaliung yang menjadi daerah operasinya.

<sup>11</sup>Nama-nama kedua puluh empat orang itu adalah: K.H.Tbg. Akhmad Khatib, Khaerul Saleh, Muhidin Nasution, E.E. Ismail, Jaro Karis, Haji Bajarad, Syamsudin, Kilap, Sarbini, Samsudin Patah, Garang, Johny, Buas, Lubis H.J., Pirmonoto, Engkim, Suwargo, Mahdi, Tajudin, Sukmowijoyo, Idham, Sidik Samsi, dan Natra.

hidup rakyat Indonesia ada di tangan pimpinan yang dinilai lemah, pimpinan yang tidak berdasarkan pada kekuatan rakyat sendiri. Menurut mereka bahwa tidak ada golongan dan pimpinan yang sanggup membela dan menjamin cita-cita, kepentingan, dan kebutuhan rakyat Indonesia kecuali rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, mereka yang menamakan dirinya "Rakyat Indonesia Berjoang" mendirikan "Tentara Rakyat".<sup>12</sup> Menurut mereka, "Tentara Rakyat" akan menuntun, membela, dan menjamin cita-cita, kepentingan, dan kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Dinyatakan bahwa "Tentara Rakyat" tidak akan meletakkan senjata sebelum semua yang diinginkan rakyat Indonesia tercapai.

Dalam "proklamasi" tersebut tercantum nama K.H. Tbg. Akhmad Khatib sebagai Pimpinan Umum Central Komando Harian "Tentara Rakyat", Khaerul Saleh sebagai Panglima Central Commando "Tentara Rakyat", dan Muhidin Nasution sebagai Kepala Staf Central Commando Harian "Tentara Rakyat". Disebutkan bahwa "proklamasi" itu disebarluaskan ke berbagai pihak, antara lain kepada para pemimpin terkemuka (*Sin Po*, 17 November 1949). Namun, kalangan umum termasuk pers tidak mengetahui proklamasi tersebut. Tidak ada satu pun surat kabar yang memberitakan proklamasi tersebut.

Setelah lahir "Tentara Rakyat", Central Komando Harian "Tentara Rakyat" mengeluarkan dua buah maklumat dan sebuah program perjuangan. Maklumat pertama dikeluarkan tanggal 11 Oktober 1949, disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan badan perjuangan, isinya bahwa angkatan bersenjata yang baru datang ke daerah Banten adalah "Tentara Rakyat". Tujuan "Tentara Rakyat" adalah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. "Tentara Rakyat" memelopori rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan sampai Belanda meninggalkan Indonesia, menghapus peraturan-peraturan yang menekan dan menindas rakyat, pedagang, dan petani dalam menjalankan kegiatannya, mengajak seluruh lapisan masyarakat terutama pemuda untuk bekerja sama dengan "Tentara Rakyat" melawan Belanda di seluruh Indonesia (Maklumat No. 1/A/C/K/H).

---

<sup>12</sup>Nama tentara yang dibentuk sesuai dengan nama tentara yang tercantum dalam Program Minimum Persatuan Perjuangan.

Maklumat kedua dikeluarkan tanggal 13 Oktober 1949, disampaikan kepada seluruh warga negara RI di daerah Banten. Maklumat tersebut isinya menyatakan: (1) "Tentara Rakyat" tetap memerangi Belanda dan pembantu-pembantunya (2) Seluruh lapisan masyarakat diminta tetap tenang dan terus bekerja, (3) Barang siapa yang mengacau, menggarong, atau melakukan provokasi sehingga menggelisahkan masyarakat akan dihukum seberat-beratnya, (4) Seluruh jawatan PP<sup>13</sup> supaya tetap tenang dan bekerja seperti biasa, (5) Semua peraturan yang dikeluarkan oleh TNI di daerah Banten tidak berlaku, (6) Seluruh lapisan masyarakat, terutama pemuda, agar tetap berorganisasi untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda dan merebut kembali kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 (Maklumat No. 2/A/C/K/H).

Terakhir, pada tanggal 13 Oktober 1949 "Tentara Rakyat" mengeluarkan program perjuangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer. Program di bidang politik antara lain: (1) Tetap mempertahankan isi dan tujuan proklamasi kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, (2) Mau berunding dengan Belanda setelah pemerintah Belanda: (a) Menarik tentara dan kekuasaannya dari seluruh kepulauan Indonesia, (b) Mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI untuk seluruh Indonesia secara *de facto* dan *de jure*, (3) Membatalkan secara resmi oleh pemerintah RI semua persetujuan dengan Belanda yaitu Persetujuan Linggajati, Persetujuan Renville, dan Persetujuan Rum-van Royen, (4) Menghentikan dan membatalkan KMB dan hasil-hasilnya, (5) Menuntut pemerintah Belanda untuk membayar semua kerugian seluruh rakyat Indonesia akibat agresi militer Belanda. Sebagai jaminan pembayaran, semua milik Belanda harus disita. Jika pemerintah Belanda tidak membayarnya, seluruh kerugian itu diperhitungkan pada milik Belanda, (6) menjamin hak-hak kaum tani dan pekerja umumnya seperti hak bersidang, mogok, protes, dan demonstrasi.

Program di bidang ekonomi yaitu: (1) Menjalankan ekonomi sesuai dengan perjuangan anti imperialisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Menghapus seluruh tanah partikular tanpa ganti rugi, (3) Mempertinggi produksi di berbagai bidang untuk mencukupi kebutuhan rakyat, (4) Menerima modal bangsa asing dengan syarat tidak mengurangi: (a) Ketetapan

---

<sup>13</sup>Mungkin yang dimaksud PP adalah Pamong Praja.

UUD-RI Pasal 33 Ayat (1), (b) Dasar kenyataan keadilan sosial untuk lapangan rakyat bekerja, (c) hak-hak dasar kaum pekerja, (d) Tidak mempengaruhi dan mengikat politik pemerintah ke luar dan ke dalam negeri, dan (4) Membangun industri dan pertanian modern untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh rakyat.

Program di bidang sosial, antara lain: (1) Memajukan pendidikan modern di berbagai bidang pengetahuan dan agama untuk seluruh lapisan masyarakat, (2) Menjamin kesempatan untuk menuntut ilmu bagi setiap warga negara, (3) Menjamin kesempatan bekerja bagi setiap warga negara atas dasar penghasilan minimal yang cukup memenuhi kebutuhan hidup. Terakhir, program di bidang militer adalah membentuk dan menyusun "Tentara Rakyat" di seluruh Indonesia (Program Perjuangan "Tentara Rakyat").

Kedua maklumat dan program perjuangan tersebut juga ditandatangani oleh K.H. Tbg. Akhmad Khatib sebagai Pimpinan Umum Central Commando Harian "Tentara Rakyat", Khaerul Saleh sebagai Panglima Central Commando Harian "Tentara Rakyat", dan Muhidin Nasution sebagai Kepala Staf Central Komando Harian "Tentara Rakyat". Kedua maklumat dan program perjuangan "Tentara Rakyat" tersebut juga tidak diketahui oleh kalangan luas. Tidak satu pun pers memberitakannya.<sup>14</sup>

K.H.Tbg. Akhmad Khatib dilahirkan di Kampung Gayam, Desa dan Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, tahun 1895. Ayahnya seorang ulama terkenal di Pandeglang. Ia belajar agama Islam di dua pesantren di Banten, salah satunya pesantren di Caringin pimpinan K.H. Asnawi. Setelah menikah dengan putri K.H. Asnawi tahun 1912, bersama istrinya ia menunaikan ibadah haji ke Mekah kemudian selama tiga tahun menetap di sana belajar agama Islam. Kembali dari Arab 1916, ia mengajar agama di pesantren milik ayah mertuanya (Williams, 1990: 252-253). Ia menjadi anggota Sarekat Islam (SI) dan tahun 1917 sebagai Ketua SI Labuan. Karena aktivitasnya yang membahayakan pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 23 Oktober 1926, sebelum pemberontakan PKI pecah, ia ditangkap kemudian dibuang di Boven Digul (Williams, 1982: 69). Pada akhir tahun 1930-an ia dikembalikan

---

<sup>14</sup>Apakah Akhmad Khatib yang tercantum sebagai Pemimpin Umum Central Commando Harian "Tentara Rakyat" ikut membuat keempat dokumen tersebut di atas, tidak diketahui secara pasti.

ke Caringin namun masih dalam pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Ketika Jepang membentuk tentara Peta ia diangkat sebagai *Daidancho* Peta di Labuan. Setelah Indonesia merdeka, tanggal 2 September 1945 ia diangkat sebagai Residen Banten. Setelah Banten diduduki Belanda melalui agresi militernya kedua, K.H. Tbg. Akhmad Khatib bersama sebagian besar aparat pemerintah daerah Banten, Kepala Polisi Keresidenan Banten beserta anak buahnya, dan TNI mengungsi ke daerah pedalaman (*Sin Po*, 4 dan Januari 1949). Tempat kedudukan Pemerintah Daerah berpindah-pindah untuk menyelamatkan diri dari serangan tentara Belanda.

Khaerul Saleh lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, tahun 1916, putera tertua dari dr. Akhmad Saleh. Ia menempuh pendidikan *Europesche Lagere School* (ELS) di Medan dan Bukittinggi, kemudian melanjutkan ke *Hogere Burger School* (HBS) di Medan. Tahun 1934 ia masuk ke sekolah Normal III di Jakarta, kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Hukum di kota yang sama. Di bidang organisasi, tahun 1937 ia masuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), organisasi mahasiswa yang radikal, kemudian menjadi ketuanya. Pada zaman pendudukan Jepang, ia bekerja di *Sendenbu* (Badan Propaganda) dan memimpin Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia (Baperpi) yang didirikan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang kandas dan tidak ada biaya. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi tokoh pemuda dan menjadi pengikut Tan Malaka (Anderson, 1988: 451). Ia hadir dalam penyusunan teks proklamasi mewakili pemuda. Atas undangan PPKI ia juga hadir dalam rapat panitia itu tanggal 18 Agustus 1945 yang membahas dan mengesahkan UUD 1945. Setelah dibentuk organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) pada tanggal 1 September 1945 yang bermarkas di Jl. Menteng Raya No. 31, Jakarta, ia terpilih sebagai Wakil Ketua. Dalam Kongres Pemuda Republik Indonesia di Yogyakarta tanggal 10 November 1945 yang membentuk Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI), ia terpilih sebagai Pemimpin Umum Dewan Pimpinan Pusat (Anderson, 1988: 285). Antara lain atas anjuran Tan Malaka dan dia, pada tanggal 7 November 1948 di Yogyakarta didirikan Partai Murba yang merupakan fusi antara Partai Rakyat, Partai Buruh Merdeka, dan Partai Rakyat Jelata. Setelah agresi militer Belanda II ia bergerilya melawan Belanda.

Mengenai Muhidin Nasution, tidak banyak diketahui. Setelah Persatuan Perjuangan dibubarkan pada bulan Juli 1946, ia pergi ke daerah Sukabumi – Cianjur. Kemudian ia bersama Waluyo memimpin

Laskar Bambu Runcing di Bogor (Cribb, 1990: 153). Ketika BR menyingkir ke Banten Selatan, ia bergabung ke sana (Cribb, 1990: 200). Muhidin Nasution datang ke Jawa Barat sebagai perwira Biro Perjuangan setelah Tan Malaka ditangkap (Cribb, 1990: 170).

”Tentara Rakyat” terus beraksi, pada suatu ketika menyerang kaum republik di Malingping, Kabupaten Lebak. Beberapa orang dari kalangan masyarakat dan sejumlah pegawai republik menjadi korban (*Warta Indonesia*, 26 Oktober 1949).

”Tentara Rakyat” umurnya pendek, pada akhir bulan Oktober 1949 mereka ditumpas. TNI dengan menggunakan *stoot troep* Brigade Tirtayasa di bawah pimpinan Letnan Satu Jambur Wardana melakukan pengejaran dan penghancuran. TNI dari luar Banten didatangkan untuk membantu usaha itu yaitu dua kompi dari Batalion pimpinan Kosasih dari Brigade Suryakencana, Sukabumi (*Sin Po*, 17 November 1949; Sunji, 1983: 43). Kedua kompi tersebut yaitu Kompi Kapten Tarmat dan Kapten Suripto bergerak dari selatan melalui Cisolok – Cobareno – Cikotok – Bayah menuju Cibaliung. Mereka juga dibantu Batalion Sudarsono yang bergerak dari utara melalui Menes – Labuan – menuju Cibaliung. Pasukan-pasukan tersebut menyerang Cibaliung – Cibadak – Air Jeruk – Air Mokla. Daerah yang sebelumnya dikuasai oleh ”Tentara Rakyat” dapat direbut kembali. Beberapa kali terjadi pertempuran. ”Tentara Rakyat” terdesak mundur dari Cibaliung ke Gunung Honja dekat Semenanjung Ujung Kulon, di sana pertempuran terjadi lagi. Kekuatan mereka diperkirakan tinggal beberapa ratus orang, karena banyak di antara mereka, sekitar 200 orang telah ditangkap dan menyerah kepada TNI (*Merdeka*, 3 dan 25 November 1949). Anggota ”Tentara Rakyat” banyak yang terbunuh, mereka terpecah, sebagian besar masuk hutan di Semenanjung Ujung Kulon (*Warta Indonesia*, 27 Oktober 1949), diduga sebagian naik perahu. Sebagian yang lain berjalan kaki ke timur melalui hutan-hutan, kembali ke daerah mereka yang lama di sebelah timur (*Merdeka*, 25 November 1949), sebagian ke Sukabumi Selatan, dan sebagian lain ke daerah Bogor. Sekitar 200 orang ”Tentara Rakyat” tertangkap dan menyerah (*Merdeka*, 4 dan 25 November 1949). Awal bulan November 1949 operasi terhadap ”Tentara Rakyat” berakhir.

Dalam pertempuran tersebut, Khaerul Saleh tidak ada di sana. Akan tetapi tanggal 4 November 1949 ketika ia menuju Jakarta lewat Balaraja tertangkap (*Sin Po*, 24 Desember 1949). Ia ditahan di penjara

Banceuy, Bandung. Perkaranya oleh Jaksa Tentara di Bandung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri di Banten (*Merdeka*, 27 Januari 1950). Tahun 1950 ia dibebaskan dari penjara, kemudian menjalani pengasingan selama beberapa tahun di Jerman Barat (Kahin, 1990: 82).

K.H. Akhmad Khatib yang telah ikut menyetujui dan menandatangani "proklamasi" dan maklumat-maklumat "Tentara Rakyat" juga tertangkap kemudian ditahan yang berwajib, dibawa ke markas Brigade Tirtayasa di Kadukacang, Cibaliung. Pada tanggal 30 November 1949, atas panggilan Staf Divisi Siliwangi, ia pergi ke Markas Divisi Siliwangi di daerah Sumedang. Panggilan itu diduga ada hubungannya dengan pasukan "Tentara Rakyat". Setelah pemanggilan tersebut, ia tidak lagi menjabat sebagai residen Banten, melainkan tenaganya diperbantukan pada Gubernur Jawa Barat Sewaka. Untuk mengisi kekosongan jabatan residen Banten, untuk sementara diangkat M. Kafrawi dari Surabaya sebagai *acting* Residen Banten. (*Merdeka*, 10 Desember 1949). Ia kemudian dibawa ke Yogyakarta, Tahun 1950 ia dibebaskan tetapi tahun berikutnya ditangkap lagi dan dipenjarakan di Bandung selama empat bulan. Tahun 1955 ia menjadi anggota Parlemen Sementara mewakili PSII dan tahun 1958 diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung RI (Kahin, 1990: 82).

Syamsuddin Chan dan Muhidin Nasution juga tertangkap. Wim Mangelep kembali ke daerahnya di hilir Sungai Citarum. Namun dalam bentrokan senjata dengan TNI ia tewas. Sidik Samsi dan Camat Nata selamat, ia kembali memimpin BR di kaki Gunung Sanggabuana, Purwakarta. Nata kemudian memenuhi amnesti resmi pada bulan Maret 1954, ia kembali ke kehidupan sipil (Cribb, 1990: 200).

### **Kesimpulan**

Pemerintah RI yang memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia–Belanda mendapat tantangan keras dari PP, organisasi bentukan dan pimpinan Tan Malaka. Karena oposisi yang kuat, kabinet Sutan Syahrir pertama jatuh, namun Presiden memilih kembali Sutan Syahrir sebagai perdana menteri. Penentangan kelompok Tan Malaka terhadap pemerintah tidak berhenti bahkan meningkat. Mereka menculik Perdana Menteri Sutan Syahrir, dan setelah itu berusaha membubarkan kabinet dan agar dibentuk kabinet baru yang personalianya pilihan mereka. Pemerintah tetap pada

pendiriannya, kelompok Tan Malaka ditangkapi dan organisasi PP dibubarkan.

Para pengikut Tan Malaka yang telah bercerai-berai tetap melakukan penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam meneruskan penentangan, aktor intelektualnya merekrut Laskar Bambu Runcing di Purwakarta. Setelah mereka berada di Banten Selatan di bawah pimpinan Khaerul Saleh namanya diganti dengan "Tentara Rakyat", suatu nama yang telah disebut dalam Program Minimum Persatuan Perjuangan. Mereka melawan pemerintah RI termasuk polisi dan TNI.

Suatu perlawanan dari dalam yang didasarkan atas suatu ideologi, tidak mudah mati, sewaktu-waktu bangkit kembali, hanya bentuknya yang baru disesuaikan dengan keadaan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Dokumen:**

"Maklumat No. 1/A/C/K/H", Lampiran Ag. B.1. No. 376/6/5/49, tanggal 26-11-1949, Intel Divisi IV Siliwangi, Koleksi Subdisjarahdisbintal Angkatan Darat di Bandung.

"Maklumat No. 2/A/C/K.H." Lampiran Ag. B.1. No. 376/6/5/49, tanggal 26-11-1949, Intel Divisi IV Siliwangi, Koleksi Subdisjarahdisbintal Angkatan Darat di Bandung.

"Proklamasi Rakjat Berdjoang", Lampiran Ag. BI No. 376/5/49, tanggal 26-11-1949, Intel Divisi IV Siliwangi, Koleksi Subdisjarahdisbintal Angkatan Darat di Bandung.

"Program Perdjoangan `Tentara Rakjat`", Lampiran Ag. B.1. No. 376/5/49, tanggal 26-11-1949, Intel Divisi IV Siliwangi, Koleksi Subdisjarahdisbintal Angkatan Darat di Bandung.

#### **Surat Kabar/Buletin:**

*Antara*, 4 dan 24 Oktober 1949.

*Merdeka*, 11 Oktober 1949, 4 dan 25 November 1949, 1 dan 10 Desember 1949, 27 Januari 1950.

*Sin Po*, 25 Agustus 1949, 17 November 1949, 24 Desember 1949.

*Warta Indonesia*, 26 dan 27 Oktober 1949, 4 Januari 1950.

**Tulisan Pelaku Sejarah dan Instansi:**

Ilyas, Moch., *et al.*, 1980, "Sejarah Perjuangan dari pada TKR/TRI/TNI Divisi I/Banten (Divisi 1000) dan Brigade Tirtayasa/SLW yang kemudian menjadi Komando Sub Territorium Banten", Pandeglang.

Panitia Sejarah Perjuangan Divisi 1000 Brigade Tirtayasa, 1980, "Sejarah Perjuangan Divisi 1000 Brigade Tirtayasa", (naskah ketik), Serang.

Rachman, H. Niamal (Letkol), 1980, "Catatan Riwayat Perjuangan Almarhum Komisaris Polisi Tk I M. Joesoef Martadilaga, Kepala Pusat Kepolisian Keresidenan Banten", Serang.

Soendji, Letkol (Purn.), 1983, "Mengenang Perjuangan Rakyat Pandeglang, 1945-1950" Bandung.

Umar, Ajip, 1975, "Perjuangan Rakyat Banten pada Jaman Jepang dan Belanda", Serang.

**Buku, Makalah, dan Karya Akademik:**

Anderson, Benedict R.O.`G., 1988, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*, (Terj. Jiman Rumbo), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ariwiadi, "Kota dan Kabupaten Bogor pada Perang Kemerdekaan Taraf ke II", Makalah Seminar Sedjarah Nasional II, 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta.

Cribb, Robert Bridson, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949: Perjuangan Antara Otonomi dan Hegemoni*, (Terj. Hasan Basari), Jakarta: Grafiti.

Fachrudin, Rudi, 1994, "Divisi Bambu Runcing: Sosok dan Aktivasnya di Celah-celah Pendudukan Jawa Barat, Juli 1947-Oktober 1949", Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.

Hatta, Mohammad, 1979, *Memoir*, Jakarta: Tintamas.

- Kahin, George McTurnan, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (terj. Nin Bakdi Soemanto), Jakarta: Sebelas Maret University Press bekerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Penerangan, 1953, *Republik Indonesia: Propinsi Djawa Barat*, Djakarta: Tanpa nama penerbit.
- Roesjan, Tbg., 1954, *Sedjarah Banten*, Djakarta: Arief.
- Suharto, 2001, "Banten Masa Revolusi, 1945-1949: Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", Disertasi Departemen Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.
- Sumantri, Iwa Kusuma, *Sedjarah Revolusi Indonesia: Masa Revolusi Bersenjata*, (Jilid II), (tanpa nama kota terbit, nama penerbit, dan tahun terbit).
- Williams, Michael C., 1990, "Utang Padi Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah", dalam Audrey Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, (Terj. Satyagraha Hoerip), Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- , 1990, *Communism, Religion, and Revolt in Banten*, Athens: Ohio University.